

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Sektor Informal.

Pandangan pertama mengenai sektor informal adalah sektor dimana individu-individu bekerja untuk dirinya sendiri (*self-employed*). Motivasi pekerja adalah memperoleh pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan hidup (*survival*). Pekerja yang kebanyakan adalah para imigran yang tinggal di kota biasanya melakukan aktifitas-aktifitas informal (baik yang sah maupun tidak sah) sebagai sumber mata pencaharian mereka. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan daripada menjadi pengangguran yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan rendah dan tidak tetap.

Konsep sektor informal yaitu membagi secara tegas kegiatan ekonomi yang bersifat formal dan non formal. Konsep tersebut pertama kali diperkenalkan oleh seorang antropology Inggris Keith Hart (1973). Istilah sektor informal biasanya digunakan untuk munjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Sektor informal di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evolusi daripada dianggap sebagai sekelompok perusahaan yang berskala

kecil dengan masukan (*inputs*) modal dan pengelolaan (*managerial*) yang besar (Sethurahman, 1996).

Sektor informal muncul ketika teori pembangunan mengalami krisis, sebagai akibat dari berkembangnya kesadaran bahwa model pertumbuhan ekonomi tidak berhasil dalam menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan di negara-negara sedang berkembang. Kondisi keberadaan sektor informal menjadi semakin penting di negara-negara sedang berkembang, apalagi setelah ekonomi Indonesia mengalami krisis seperti saat ini, dimana permintaan angkatan kerja di sektor informal ini makin besar seiring dengan siklus usaha sektor formal yang tidak berjalan normal. Kondisi perekonomian seperti sekarang ini mengakibatkan sektor formal selektif dalam menerima pasokan tenaga kerja. Bahkan berpeluang besar dalam mem-PHK tenaganya, sehingga sektor informal yang menjadi tumpuan dan harapan bagi mereka dimasa mendatang. Sektor informal bukan hanya sebagai tempat tumpuan, tetapi juga menjadi alternatif yang komplementer terhadap sektor formal.

a. Jenis-jenis Sektor Informal.

Menurut Keith Hart (1973), ada dua macam sektor informal dilihat dari kesempatan memperoleh penghasilan, yaitu:

1) Sah; terdiri atas:

a) Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder meliputi pertanian,

perdagangan yang berorientasi pasar, kontraktor bangunan dan

- b) Usaha tersier dengan modal yang relatif besar meliputi perumahan, transportasi, usaha-usaha untuk kepentingan umum, dan lain-lain.
- c) Distribusi kecil-kecilan meliputi pedagang kaki lima, pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang asongan, dan lain-lain.
- d) Transaksi pribadi meliputi pinjam-meminjam, pengemis.
- e) Jasa yang lain meliputi pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, pembuang sampah, dan lain-lain.

2) Tidak sah; terdiri atas :

- a) Jasa meliputi kegiatan dan perdagangan gelap pada umumnya: penadah barang-barang curian, lintah darat, perdagangan obat bius, penyelundupan, pelacuran, dan lain-lain.
- b) Transaksi meliputi pencurian kecil (pencopetan), pencurian besar (perampokan bersenjata), pemalsuan uang, perjudian, dan lain-lain.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi sektor informal yang ada sangat sempit dan hanya menunjukkan sektor tertentu di daerah kota, tetapi BPS mencoba membuat kajian tentang sektor informal dirangkum dan dicoba diterjemahkan ke dalam bentuk data. Sektor informal terdiri dari unit-unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan *tidak* mencintakan kesempatan kerja dan mendapatkan bagi diri sendiri

dan dalam usahanya sangat dihadapkan berbagai kendala seperti faktor modal fisik, faktor pengetahuan dan keterampilan (ILO, 2000).

Dalam laporan ILO dan dari berbagai penelitian tentang sektor informal di Indonesia (Hidayat, 1978), telah menghasilkan sepuluh ciri pokok sebagai berikut :

- 1) Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia disektor formal.
- 2) Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
- 3) Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
- 4) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini.
- 5) Unit usaha mudah keluar masuk dari satu subsektor ke subsektor lain.
- 6) Teknologi yang digunakan bersifat primitif.
- 7) Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga kecil.
- 8) Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-man-enter prises* dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga.
- 9) Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi

10) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa yang berpenghasilan menengah.

Sektor informal juga merupakan katup pengaman bagi perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia, karena kemampuan sektor ini untuk menyerap banyak tenaga kerja. Mudah-mudahan sektor informal untuk menampung tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal, dikarenakan untuk bekerja di sektor informal tidak memerlukan persyaratan yang sulit seperti di sektor formal. Kegiatan ekonomi di sektor informal tidak saja sebagai pelengkap dari kegiatan ekonomi sektor formal, namun berperan pula sebagai penyambung rangkaian kegiatan ekonomi yang belum/tidak dapat dicapai sektor formal, sebagai contoh: pedagang pengecer yang menyalurkan barang-barang produksi sektor formal.

Sektor informal memiliki peran yang besar di negara-negara sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia. Sekitar 30-70 persen populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal dan sisanya bekerja pada sektor formal. Di tengah pergolakan krisis keuangan global ini, tampaknya kita perlu untuk berupaya kembali memberdayakan sektor informal. Selama ini memang sudah banyak sekali program yang diluncurkan oleh pemerintah dengan dana triliunan rupiah. Namun hasil tidak menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Kegagalan berbagai program tersebut ditengarai

berupa beberapa hal berikut yaitu salah desain kebijakan salah

identifikasi masalah dan target program sejak awal, kelembagaan yang tak siap, atau pengawasan dalam pelaksanaan yang buruk.

2. Pendidikan

Pendidikan memberikan sumbangan secara langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia. Pendidikan diharapkan dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi lewat efeknya pada peningkatan kemampuan manusia dan motivasi manusia untuk berprestasi.

Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah, di mana keluarga merupakan lembaga pendidikan utama. Di samping itu pendidikan merupakan unsur modernisasi yang mengarah kepada terciptanya suatu cara berpikir yang rasional dan gaya hidup yang mendorong diapkannya teknologi yang modern. Selama satu dasawarsa terakhir pendidikan di Indonesia menunjukkan peningkatan walaupun masih terdapat kesenjangan hasil pendidikan yang telah dicapai

----- (BPS, 2007)

Tabel 2.1.
Penduduk DIY Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama
Seminggu yang Lalu di Kegiatan Informal menurut Kabupaten/Kota
dan Pendidikan Tinggi yang ditamatkan (Agustus 2007)

Kabupaten/ Kota	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						Jumlah Total
	Tidak/Be lum Pernah Sekolah	Tidak/B elum Tamat SD	Sekolah Dasar	SLTP	SMTA	Diplom a/I/II/III	
Kulon Progo	7.214	22.371	62.890	26.769	23.113	1.879	144.236
Bantul	27.416	28.434	81.787	47.613	28713	5.382	219.345
Gunung Kidul	53.478	30.552	137.625	75.311	15.431	3.292	315.689
Sleman	17.909	26.890	66.378	46.634	51.537	10.740	220.088
Kota Yogyakarta	1.733	6.983	13.449	12.866	17.657	4.844	57.532
Jumlah/Total	107.750	115.230	362.129	209.193	136.451	26.137	956.890

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Dalam Angka, 2007.

Dari tabel 2.1., di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja di sektor informal mempunyai tingkat pendidikan rendah yaitu tamatan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 362.129 dari 956.890 penduduk yang bekerja di sektor informal pada tahun 2007, tetapi ada juga yang mempunyai tingkat pendidikan hingga Perguruan Tinggi. Dengan melihat tingkat pendidikan penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja di sektor informal masih tergolong rendah (SD), maka pola pikir mereka dalam sistem pengelolaan (manajemen) juga masih cukup sederhana dan belum mampu mengembangkan usahanya ke arah yang lebih pesat lagi.

Berdasar tabel 2.1., juga terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin menurun jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal. Sebagian besar pekerja dengan predikat tidak pernah sekolah berusaha di sektor informal. Peranan sektor informal masih tetap besar

hingga tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Peranan sektor informal tampak relatif lebih rendah untuk pekerja tamatan SMTA. Akhirnya pada tingkat pendidikan SMTA ke atas, peran sektor informal terus berkurang dan peranan dalam penyerapan pekerja digantikan oleh sektor formal. Jadi terdapat hubungan positif antara peran sektor informal dengan tingkat pendidikan pekerja.

Pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu *input* dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja agar dapat bekerja dengan produktif karena kualitasnya. Hal ini selanjutnya akan mendorong peningkatan output yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan penduduk. Kombinasi antara investasi dalam modal manusia dan modal fisik diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi. Titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah produktifitas tenaga kerja (*Labor Productivity*). Dengan asumsi bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, ketrampilan yang lebih baik, maka sudah merupakan suatu jaminan pendapatan yang diterima semakin baik. Dan semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka tingkat hidup dan kesejahteraan pun akan semakin baik.

3. Tenaga Kerja

Menurut mahzab Klasik, penduduk (dalam hal ini tenaga kerja). Merupakan salah satu faktor produksi dalam perekonomian, selain tanah, modal dan kewirausahaan. Seseorang akan mulai bekerja bila *utility* yang diterima lebih besar daripada *disutility* tersebut menimbulkan penawaran tenaga kerja. Sementara itu, bagi pengusaha nilai tambah *output* barang

dan jasa haruslah minimal sama dengan upah yang dibayarkan bagi tenaga kerja. Dengan demikian lahirlah permintaan tenaga kerja. Kondisi saat penawaran dan permintaan bertemu disebut kondisi keseimbangan. Menurut mahzab ini, semua tenaga kerja akan terserap dalam perekonomian, atau akan selalu terjadi *full employment*. Dalam kondisi tersebut, menurut Jean Baptist Say, semua barang dan jasa yang akan diproduksi akan habis dibeli oleh masyarakat (*supply creates its own demand*) (Mulyadi S, 2003).

Pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi oleh hubungan antara manusia (*human*) dengan faktor-faktor produksi yang lain dan sifat-sifat manusia itu sendiri, yang sering dimaksud dengan *human resource* di sini adalah penduduk sebagai suatu keseluruhan. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, secara ekonomis tidak semua tenaga kerja terlibat dalam pekerjaan atau kegiatan produktif. Hanya sebagian dari mereka yang sesungguhnya terlibat, sedangkan sebagian lainnya tidak terlibat. Mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan yang produktif disebut bukan angkatan kerja (*non in the labour force*). Sedangkan mereka yang terlibat dalam pekerjaan atau usaha produktif disebut angkatan kerja (*labour force*).

Angkatan kerja (*labor force*) adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja, namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Kemudian penduduk yang bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh penghasilan, baik bekerja penuh maupun tidak bekerja penuh.

Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 sampai 64 tahun. Sejauh ini kita memperhatikan peranan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan nasional dari segi kuantitas atau jumlah saja. Sementara banyak yang beranggapan bahwa kalau jumlah tenaga kerja yang dipakai dalam suatu proses produksi meningkat, maka jumlah produksi yang bersangkutan juga meningkat. Dengan kata lain kalau tidak ada peningkatan jumlah tenaga kerja maka jumlah produksi akan tetap. Pernyataan yang demikian ini, tidak dapat seluruhnya dianggap benar, walaupun jumlah tenaga kerja itu menjadi lebih baik, maka dapat terjadi bahwa tingkat produksi akan meningkat pula. Lebih jauh lagi dapat melihat tenaga kerja dari lamanya hari kerja (*maindays*) atau jam kerja (*mainhours*) dan intensitas kerjanya.

Tujuan utama dari faktor produksi tenaga kerja adalah untuk mendapatkan balas jasa yang disebut upah dan gaji sebagai harga dari tenaga kerja tersebut. Sedangkan jumlah orang yang dapat terserap dalam suatu pekerjaan tergantung dari besarnya permintaan (*demand*) dalam masyarakat. Dengan kata lain besar kecilnya permintaan tenaga kerja dipengaruhi antara lain oleh aktivitas ekonomi maupun tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah di pasar tenaga kerja dan demikian

sebaliknya. Permintaan tenaga kerja ini dapat datang dari sektor formal maupun sektor informal.

Karakteristik yang dapat mempengaruhi permintaan maupun penawaran angkatan kerja untuk memasuki kerja (terserap) oleh sektor informal adalah sektor informal memberikan kebebasan masuk maupun keluar kerja kepada angkatan kerja tanpa adanya persyaratan-persyaratan seperti yang diberlakukan pada sektor formal. Akibatnya bagi angkatan kerja yang berminat atau tertarik untuk memasuki kerja di sektor informal langsung dapat terserap sesuai dengan jenis yang diminati.

Tenaga kerja bukan hanya penting sebagai subyek yang melakukan segala kegiatan pembangunan. Akan tetapi juga penting karena pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan akan meningkatkan daya beli bagi masyarakat dan seterusnya akan menimbulkan permintaan efektif mengenai barang dan jasa yang dihasilkan dalam pembangunan. Dengan kata lain pekerjaan mampu menimbulkan dan menumbuhkan pasar dalam negeri. Dari sini terlihat bahwa melalui penggunaan tenaga kerja, *multiplier* pendapatan dapat terjadi.

Rata-rata jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada sektor informal pedagang dan sektor informal jasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 2 tenaga kerja. Jika terjadi penambahan jumlah tenaga kerja, pada umumnya tenaga kerja berasal dari keluarga sendiri. Dengan demikian, sektor informal memiliki peranan penting dalam memberikan sumbangan bagi pembangunan perkotaan, karena sektor informal mampu

menyerap tenaga kerja (terutama masyarakat kelas bawah) yang cukup signifikan sehingga mengurangi problem pengangguran diperkotaan dan meningkatkan penghasilan kaum miskin diperkotaan. Selain itu, sektor informal memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintahan kota.

4. Jam Kerja

Kerja diartikan sebagai proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada suatu unit sumber daya, pengubahan atau penambahan nilai pada suatu unit alat pemenuhan kebutuhan yang ada (Riningsih, 2005).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) jam kerja adalah waktu yang dijadwalkan untuk perangkat peralatan yang dioperasikan atau waktu yang dijadwalkan bagi pegawai untuk bekerja. Jam kerja bagi seseorang sangat menentukan efisiensi dan produktivitas kerja.

Dari segi Undang-Undang Perburuhan, jam kerja adalah jam atau waktu yang dilakukan di bawah pengawasan pimpinan dari pihak kantor. Banyaknya jumlah jam kerja tergantung dari pihak kantor yang mempekerjakan para karyawan tersebut. Pada dasarnya jam kerja adalah 40 (empat puluh) jam dalam seminggu, 8 (delapan) jam sehari (tidak termasuk jam istirahat). Tentang jam kerja berdagang, usaha perfilman, usaha kesehatan, kebersihan, penerima tamu, atau usaha sampingan; adalah 44 (empat puluh empat) jam dalam seminggu.

Di daerah pedesaan jumlah jam kerja yang paling banyak dijalani para pekerja adalah antara 35 hingga 44 jam per minggu. Seperempat pekerja di desa bekerja dalam rentang waktu ini. Sedangkan di daerah

perkotaan jumlah jam kerja terbanyak yang dijalani adalah antara 45 hingga 59 jam seminggu. Sepertiga pekerja di kota bekerja dalam rentang waktu di atas normal ini. Sekitar 17 persen pekerja di kota bahkan bekerja lebih lama lagi, 60 jam atau lebih dalam seminggu (Dumairy, 1996).

Tersedianya jam kerja untuk proses produksi dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan untuk bekerja. Orang mau bekerja tetapi tidak mampu bekerja sama artinya bagi peningkatan produksi dengan orang yang mampu bekerja tetapi tidak mau bekerja. Oleh karena itu kita harus sanggup mencari faktor-faktor apa yang yang dapat meningkatkan kemauan dan kemampuan untuk bekerja seseorang. Teori ekonomi sudah menemukan bahwa kemauan seseorang untuk bekerja itu lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat upah yang ada.

Semakin tinggi tingkat upah, semakin tinggi tingkat kemauan seseorang untuk bekerja atau menawarkan tenaga kerjanya. Dilain pihak kemampuan untuk bekerja seseorang terutama sekali dipengaruhi oleh keadaan kesehatan dan kecakapannya, keterampilan dan keahliannya. Selanjutnya tingkat kesehatan dipengaruhi oleh keadaan gizi dan lingkungannya, sedangkan kecakapan, keterampilan dan keahlian dipengaruhi oleh tingkat pendidikan baik formal maupun tidak formal seperti latihan-latihan kerja (*on the job training*).

Di samping itu, pengelolaan satuan jam kerja juga perlu mendapat perhatian. Pengelolaan satuan jam kerja yang belum maksimal akan mengakibatkan pemborosan (*inefisiensi*) dalam bekerja. Satuan penggunaan

hendaknya dapat melaksanakan ketentuan waktu kerja yang berlaku pada perusahaan tersebut. Dalam usahanya memenuhi permintaan pasar, maka setiap pengusaha perlu mengatur waktu kerja para karyawan secara lebih tepat dan memperhatikan kualitas tenaga kerja guna menghasilkan produksi sesuai yang diharapkan perusahaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pengusaha tersebut.

Para pekerja sektor informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, rata-rata bekerja sehari selama 8 jam, ada yang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore atau sebaliknya dari jam 3 sore sampai jam 11 malam, namun itu semua tergantung pada masing-masing usaha yang mereka lakukan baik para pedagang atau penyedia jasa.

5. Modal Kerja

Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam bentuk pos modal (modal saham), surplus, dan laba yang ditahan, atau kelebihan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya (Munawir, 1979).

Menurut Kamaruddin (1997) modal kerja yang tepat merupakan syarat keberhasilan suatu perusahaan apalagi bagi perusahaan kecil, di samping itu modal kerja sangat menentukan posisi likuiditas perusahaan dan likuiditas adalah persyaratan keberhasilan serta kontinuitas perusahaan.

Adanya modal kerja sangat penting bagi suatu perusahaan karena dengan modal kerja yang cukup itu menunjukkan hati perusahaan untuk

beroperasi dengan seekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul adanya krisis atau kekacauan keuangan. Akan tetapi adanya modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif, dan hal ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan lebih disia-siakan. Sebaliknya adanya ketiadcukupan ataupun misalnya manajemen dalam modal kerja merupakan sebab utama kegagalan suatu perusahaan.

Pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Menurut Nurkse, lingkaran setan kemiskinan di negara terbelakang dapat digunting melalui pembentukan modal. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendapatan di negara terbelakang maka permintaan, produksi dan investasi menjadi rendah atau kurang. Hal ini menyebabkan kekurangan dibidang barang modal yang dapat diatasi melalui pembentukan modal. Lewat itu persediaan mesin, alat-alat dan perlengkapan meningkat, skala produksi meluas, *Overhead* ekonomi dan sosial tercipta. Pembentukan modal membawa kepada pemanfaatan penuh sumber-sumber yang ada. Jadi pembentukan modal menghasilkan kenaikan besarnya *output* nasional, pendapatan dan pekerjaan, dengan demikian memecahkan masalah inflasi dan pemerataan pendapatan serta membuat perekonomian bebas dari beban

Kebanyakan pengusaha di sektor informal menggantungkan diri pada uang (tabungan) sendiri, atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal (di luar sektor perbankan/keuangan) untuk kebutuhan modal kerja dan investasi mereka. Walaupun banyak juga pengusaha-pengusaha kecil yang memakai fasilitas-fasilitas kredit khusus dari pemerintah. Selain itu, investasi di sektor informal rata-rata jauh lebih rendah daripada investasi yang dibutuhkan sektor formal. Besarnya investasi bervariasi menurut jenis kegiatan dan skala usaha.

Untuk mendapatkan modal usaha, antara pengusaha yang satu dengan yang lain mempunyai cara yang berbeda. Namun secara garis besar kebutuhan modal suatu industri dapat dipenuhi dari sendiri dan dari luar berupa pinjaman atau kredit. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pihak perusahaan itu sendiri (cadangan, laba). Sedangkan modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan hutang yang harus dibayar kembali (Riyanto 1995).

Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan dapat dipenuhi dari dua sumber :

a. Sumber intern (*Internal Sources*) adalah modal yang berasal dari perusahaan sendiri, yang meliputi :

1) Laba yang ditahan.

2) Deposito aktif tetap yang dilaksanakan oleh perusahaan

- 3) Keuntungan penjualan surat-surat berharga.
 - 4) Cadangan penyusutan.
- b. Sumber eksternal (*Eksternal Sources*) adalah modal yang berasal dari luar perusahaan, yang meliputi :
- 1) Supplier.
 - 2) Bank-bank.
 - 3) Pasar modal yaitu pasar modal yang dalam bentuk konkritnya adalah bursa efek berfungsi mengalokasikan dana dari perorangan atau lembaga yang mempunyai surplus tabungan kepada perusahaan yang kekurangan tabungan (Indriyo, 2001).

Pembentukan modal juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu bangsa dan membantu memenuhi segala sesuatu yang diperlukan oleh penduduk yang semakin meningkat. Kalau pembentukan modal menyebabkan penggunaan sumber alam, secara tepat dan pendirian berbagai industri, maka tingkat pendapatan bertambah dan berbagai macam kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Akhirnya, kenaikan laju pembentukan modal menaikkan tingkat pendapatan nasional. Proses pembentukan modal tersebut membantu menaikkan *output* yang pada gilirannya menaikkan laju pendapatan nasional. Jadi kenaikan laju dan tingkat pendapatan nasional tergantung pada kenaikan laju pembentukan modal. Dengan demikian pembentukan modal merupakan jalan keluar utama dari masalah rumit Negara terbelakang, dan

6. Pendapatan

Secara etimologis pendapatan berasal dari kata "dapat" yang beroleh, diperoleh, kena; misalnya : Upah sepuluh ribu rupiah. Kemudian mendapat tambahan awalan 'pen' dan akhiran 'an' yang artinya hasil pencarian atau usaha, perolehan; misalnya, sebulan tidak kurang dari lima puluh ribu rupiah, (Poerwadarminto, 1984). Jadi, pendapatan adalah hasil pencaharian atau usaha yang diperoleh seseorang dalam sehari atau sebulan.

Pendapatan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai hasil berupa uang atau hal materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas. Sedangkan pendapatan rumah tangga adalah total pendapatan dari setiap anggota rumah tangga dalam bentuk uang atau natura yang diperoleh baik sebagai gaji atau upah usaha rumah tangga atau sumber lain. (Samuelson dan Nordhaus, 1995). Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (Samuelson dan Nordhaus, 1995).

Menurut Sadono Sukirno (1994) pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai jenis semua pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun yang diterima oleh suatu penduduk negara. Definisi lain dari pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Dengan demikian

pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendapatan keluarga berupa jumlah keseluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga, dipakai untuk membagi keluarga dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu : pendapatan rendah, pendapatan menengah dan pendapatan tinggi.

Pembagian diatas berkaitan dengan status pendidikan dan keterampilan serta jenis pekerja seseorang. Namun sifatnya sangat relatif. Pendapatan seorang pegawai negeri golongan IV dengan pendidikan sarjana akan kalah bila dibandingkan dengan pendapatan seseorang pedagang yang sukses walaupun hanya berpendidikan SLTP. Akan tetapi dari segi status dan sisi-sisi kehidupan yang lain antara keduanya memiliki perbedaan dalam pandangan masyarakat, karena taraf hidup bukan saja diukur dari segi material, akan tetapi dari segi moral tidak kalah pentingnya. Sebagaimana pendapat diatas, bahwa pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat, oleh karenanya setiap orang yang bergelut dalam suatu jenis pekerjaan tertentu termasuk pekerjaan disektor informal, berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatan dari hasil usahanya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan sedapat mungkin pendapatan yang diperoleh dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Dalam hal ini pendapatan juga bisa diartikan sebagai pendapatan bersih seseorang baik berupa uang atau natura. Secara umum pendapatan

a. Gaji dan upah

Suatu imbalan yang diperoleh seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain, perusahaan swasta atau pemerintah.

b. Pendapatan dari kekayaan

Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total produksi dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk uang atau lainnya, tenaga kerja keluarga dan nilai sewa kapital untuk sendiri tidak diperhitungkan

c. Pendapatan dari sumber lain

Dalam hal ini pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja antara lain penerimaan dari pemerintah, asuransi pengangguran, menyewa aset, bunga bank serta sumbangan dalam bentuk lain. Tingkat pendapatan (*income level*) adalah tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh seorang individu atau keluarga yang didasarkan atas penghasilan mereka atau sumber-sumber pendapatan lain.

Menurut Sumardi, Evers (1992) pendapatan yang diterima seseorang berasal dari berbagai sumber pendapatan yaitu :

- a. Pendapatan sektor formal, yaitu pendapatan yang bersumber dari upah atau gaji yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan.
- b. Pendapatan sektor informal, yaitu pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti dagang, tukang dan buruh.

- c. **Pendapatan sub intern, yaitu pendapatan yang bersumber dari usaha sendiri seperti dari hasil bercocok, hasil dari beternak, hasil dari kebun dan sebagainya.**

Macam-macam Pendapatan menurut Biro Pusat Statistik merinci pendapatan dalam kategori sebagai berikut (Riningsih, 1995):

- a. **Pendapatan berupa uang, yaitu pendapatan dari :**
- 1) **Gaji dan upah yang diperoleh dari :**
 - a) **Kerja pokok**
 - b) **Kerja sampingan**
 - c) **Kerja lembur**
 - d) **Kerja kadang-kadang**
 - 2) **Usaha sendiri yang meliputi :**
 - a) **Hasil bersih dari usaha sendiri**
 - b) **Komisi dari mana saja**
 - c) **Penjualan dari kerajinan rumah yang dihasilkan**
 - 3) **Hasil investasi yaitu pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah atau modal yang digunakan orang lain.**
 - 4) **Keuntungan sosial yaitu pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.**
- b. **Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan yang berupa :**
- 1) **Bagian pembayaran upah dari gaji yang dibentuk dalam : bonus, pengobatan, transportasi, perumahan, rekreasi.**
 - 2) **Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah antara lain :**

- a) barang yang diproduksi di rumah
 - b) sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah yang ditempati
- 3) Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan yaitu penerimaan yang berupa pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai, penagihan piutang, pinjaman utang, kiriman uang, warisan.

Hubungan pendapatan dengan produksi adalah setiap faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian dimiliki oleh seseorang. Pemiliknya menjual faktor produksi tersebut kepada pengusaha dan sebagai balas jasanya mereka akan memperoleh pendapatan. Tenaga kerja mendapat gaji dan upah, tanah memperoleh sewa, modal memperoleh bunga dan keahlian keusahawanan memperoleh keuntungan. Pendapatan yang diperoleh masing – masing jenis faktor produksi tersebut tergantung kepada harga dan jumlah masing – masing faktor produksi yang digunakan. Jumlah pendapatan yang diperoleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu barang adalah sama dengan harga dari barang tersebut (Sadono Sukirno, 1996).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang berjudul "*Profit dan Strategi Pengembangan Sektor Informal di Kota Medan*" oleh Ali Tohar, 2003, dengan tujuan (1.)

Mengetahui gambaran profit/karakteristik pedagang sektor informal

(pedagang makanan dan minuman) di Kota Medan (2.) Mengetahui faktor modal investasi, pengalaman berdagang, jam kerja, tenaga kerja dan modal kerja dapat mempengaruhi pendapatan pedagang sektor informal (makan dan minum) Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan analisis statistik induktif dengan Uji regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah (1.) Mengetahui profil pedagang sektor informal Kota Medan (2.) Pendapatan pedagang sektor informal khususnya pedagang makanan dan minuman Kota Medan dipengaruhi secara signifikan oleh variabel modal investasi, jam kerja, tenaga kerja dan modal kerja yang dikeluarkan, namun tidak berpengaruh nyata terhadap variabel pengalaman pedagang sektor informal (3.) Mengetahui konsep strategi pengembangan pedagang sektor informal Kota Medan.

Dalam penelitian yang berjudul "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha pada Sektor Informal*" oleh Sukriani & Wa Ode Irma, 2008, menganalisis bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha pada sektor informal, khusus pedagang kaki lima makan dan minum di kawasan Manahan Solo. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengukuran variabel yang digunakan yaitu variabel tenaga kerja yang digunakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yakni pendapatan bersih pedagang kaki lima.

Dalam penelitian yang berjudul *"Pengaruh Modal Kerja Dan Satuan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pada Industri Kecil Pengrajin Genting di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan "* oleh Riningsih, 2005, tujuan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh modal kerja dan satuan jam kerja terhadap pendapatan pada industri kecil pengrajin genting di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. (2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh modal kerja dan satuan jam kerja terhadap pendapatan pada industri kecil pengrajin genting di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh modal kerja dan satuan jam kerja terhadap pendapatan pada industri kecil pengrajin genting di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan sebesar 70,2 %.

Dalam penelitian yang berjudul *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Konveksi Studi Kasus di Pasar Godean, Sleman, Yogyakarta"* oleh Galih Suryananto, 2005. Dengan tujuan (1.) Untuk menganalisis berapa besar pengaruh jam berdagang terhadap pendapatan pedagang konveksi. (2.) Untuk menganalisis berapa besar pengaruh modal dagang terhadap pendapatan pedagang konveksi. (3.) Untuk menganalisis berapa besar pengaruh pengalaman berdagang terhadap pendapatan pedagang konveksi. (4.) Untuk menganalisis berapa besar pengaruh jam berdagang, modal dagang, pengalaman berdagang terhadap pendapatan pedagang konveksi. Metode analisis yang digunakan adalah uji

asumsi klasik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1.) Modal dagang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang konveksi. (2.) Jam berdagang tidak berpengaruh atau signifikan terhadap pendapatan pedagang konveksi. (3.) Pengalaman berdagang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang konveksi. (4.) Secara bersama modal dagang, jam berdagang dan pengalaman berdagang sangat mempengaruhi pendapatan pedagang konveksi atau secara serentak berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang konveksi.

C. Hipotesis

Berdasar latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pendapatan sektor informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan sektor informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Jam kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan pada sektor informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Modal kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan sektor informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.